CIVIC EDUCATION PERSPECTIVE JOURNAL

Analisis Dampak Media Sosial terhadap Literasi Politik dan Partisipasi Demokratis Generasi Z di Era Post-Truth

Civic Education Perspective Journal
Vol. 5 No. 2 (2025)
online-journal.unja.ac.id/cepj/indeks

Supri Yanto[1], Putri Irmala Sari[2]
[1]Politeknik Negeri Lampung, Indonesia
[2]Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

***Corresponding Author*:** supri_yanto@polinela.ac.id

Article Info

Article history:
Received: 06-02-2025
Revised: 22-04-2025
Accepted: 12-06-2025

Kata Kunci:
Tansformasi digital
Pendidikan politik
Media sosial,
Literasi politik
Generasi Z

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transformasi digital dalam pendidikan politik dengan fokus pada dampak media sosial terhadap literasi politik dan partisipasi demokratis Generasi Z di era post-truth. Penelitian ini melibatkan partisipasi demokratis Generasi Z di era post-truth karena generasi ini merupakan digital native yang rentan terhadap disinformasi media sosial, namun juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan politik. Fenomena post-truth yang ditandai dengan mudahnya penyebaran disinformasi melalui media sosial telah menciptakan tantangan baru dalam pendidikan politik. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed method* dengan melibatkan 450 mahasiswa berusia 18-24 tahun dari lima perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei online, focus group discussion, wawancara mendalam dengan ahli pendidikan politik, dan analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78% responden mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, namun hanya 35% yang memiliki kemampuan memadai dalam memverifikasi kebenaran informasi. Penelitian menemukan korelasi signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat literasi politik ($r=0.67$, $p<0.01$) dan tingkat partisipasi demokratis ($r=0.58$, $p<0.01$). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian mengusulkan model pendidikan politik digital yang mengintegrasikan pendekatan digital citizenship dengan pendidikan politik konvensional. Model ini menekankan pada pengembangan keterampilan verifikasi informasi, pemikiran kritis, dan partisipasi demokratis yang bertanggung jawab di ruang digital. Hasil penelitian berkontribusi pada pengembangan strategi pendidikan politik yang adaptif terhadap transformasi digital.

Keywords:

Digital transformation
Political education
Social media,
Political literacy
Generation Z

Abstract

This research examines digital transformation in political education with a focus on the impact of social media on political literacy and democratic participation of Generation Z in the post-truth era. The research specifically explores Generation Z's democratic engagement in this context, as this cohort represents digital natives who are vulnerable to social media disinformation yet possess significant potential as agents of political change. The post-truth phenomenon characterized by the easy spread of disinformation through social media has created new challenges in political education. The study used a mixed method approach involving 450 students aged 18-24 years from five public universities in Indonesia. Data were collected through online surveys, focus group discussions, in-depth interviews with political education experts, and social media content analysis. The results showed that 78% of respondents relied on social media as the main source of political information, but only 35% had sufficient ability to verify the truth of the information. The study revealed a statistically significant correlation between social media usage intensity and both political literacy ($r=0.67$, $p<0.01$) as well as democratic participation levels ($r=0.58$, $p<0.01$). Grounded in these results, the research introduces a digital political education framework synthesizing digital citizenship principles with conventional pedagogical approaches in political education.The framework prioritizes three core competencies: information authentication proficiency, critical reasoning development, and ethically-grounded civic engagement within digital ecosystems. These outcomes advance the formulation of political education methodologies responsive to sociotechnical evolution.

Pendahuluan

Era digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah pendidikan politik dan partisipasi demokratis (Mudrikah *et al.*, 2024). Perubahan ini semakin terasa signifikan dengan hadirnya generasi Z yang tumbuh dan berkembang sebagai digital native, yaitu generasi yang sejak lahir telah terpapar teknologi digital dan internet. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara informasi politik disebarkan dan dikonsumsi, tetapi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat, khususnya generasi muda, memahami dan berpartisipasi dalam proses demokratis (Mannayong, S and Faisal, 2024).

Fenomena post-truth yang mewarnai lanskap politik kontemporer menambah kompleksitas tantangan dalam pendidikan politik. Era post-truth ditandai dengan situasi di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi (Adzfar and Chair, 2021). Media sosial, sebagai platform dominan yang digunakan generasi Z, berperan signifikan dalam menciptakan ruang informasi yang sarat dengan berita bohong, disinformasi, dan narasi yang terdistorsi. Kondisi ini menciptakan urgensi untuk mengkaji ulang dan merumuskan kembali pendekatan dalam pendidikan politik yang lebih adaptif terhadap realitas digital (Wanma, 2015).

Penelitian menggunakan pendekatan *mixed method* dengan melibatkan 450 mahasiswa berusia 18-24 tahun dari lima perguruan tinggi negeri di Indonesia. Karakteristik unik generasi ini, yang meliputi ketergantungan tinggi pada teknologi digital, preferensi terhadap informasi visual dan singkat, serta kecenderungan multitasking, membutuhkan pendekatan pendidikan politik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Namun, penelitian terkait efektivitas pendidikan politik konvensional dalam menghadapi tantangan era digital masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia (Sudiantini *et al.*, 2023).

Transformasi digital juga telah mengubah pola partisipasi politik generasi muda (Kyroglou and Henn, 2017; Hrčková, 2018; Ahmad, Alvi and Ittefaq, 2019; Chang, 2019; Kholisoh *et al.*, 2019; Potochnick and Stegmaier, 2020; Yin, 2022; Cobis and Rusadi, 2023). Aktivisme digital (digital activism) menjadi bentuk baru partisipasi politik yang populer di kalangan generasi Z (Firamadhina and Krisnani, 2021). Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi politik tetapi juga menjadi arena diskusi, mobilisasi, dan aksi politik (Cullinane, 2007; J., 2007; Silviani *et al.*, 2018; Affandi, Sulistyaningsih and Hijri, 2019; Andhini, 2020; Kryshtanovskaya and Lavrov, 2022). Fenomena ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi penguatan demokrasi . Di satu sisi, platform digital memperluas akses dan kesempatan partisipasi politik. Namun di sisi lain, fenomena echo chamber dan filter bubble di media sosial berpotensi menciptakan polarisasi dan radikalisasi pandangan politik.

Literasi politik di era digital menjadi semakin kompleks karena tidak hanya mencakup pemahaman tentang sistem dan proses politik, tetapi juga kemampuan untuk memverifikasi informasi, menganalisis bias media, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi politik online (Mergel, 2012; Porfilio and Viola, 2012; Gudele and Rivza, 2015; Raffaghelli,

2018; Latif, Afandi and Darmawan, 2020; Lishetiyana *et al.*, 2023). Kehadiran algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten sesuai preferensi pengguna semakin mempersulit upaya membangun pemahaman politik yang komprehensif dan objektif. Hal ini menuntut pengembangan model pendidikan politik yang mampu membekali generasi Z dengan keterampilan *digital citizenship* yang kuat (Nur Haryani *et al.*, 2024), (Zainudin, 2024).

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat dinamika politik kontemporer yang diwarnai dengan meningkatnya polarisasi dan menurunnya kualitas diskursus politik di ruang digital. Pemilihan umum dan berbagai momentum politik penting seringkali diwarnai dengan persebaran hoaks dan disinformasi yang masif di media sosial. Kondisi ini tidak hanya mengancam integritas proses demokratis tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan generasi muda terhadap sistem politik dan demokrasi.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menganalisis secara komprehensif interaksi antara transformasi digital, pendidikan politik, dan partisipasi demokratis generasi Z. Melalui pendekatan mixed method, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pola konsumsi informasi politik generasi Z di media sosial, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap literasi politik dan kualitas partisipasi demokratis. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan mengembangkan model pendidikan politik yang mengintegrasikan elemen digital citizenship dengan pendidikan politik konvensional (Zainudin, 2024), (Prayitno and Maulia, 2024; Usmanto, 2024).

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan pemahaman teoretis dan praktis tentang transformasi pendidikan politik di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan program pendidikan politik yang lebih efektif dalam mempersiapkan generasi Z menghadapi tantangan demokrasi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus akademik tentang peran teknologi digital dalam transformasi praktik demokratis dan implikasinya bagi masa depan demokrasi. Melalui analisis mendalam terhadap dinamika transformasi digital dalam pendidikan politik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat literasi politik dan meningkatkan kualitas partisipasi demokratis generasi Z. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis generasi ini sebagai agen perubahan dan penentu masa depan demokrasi di era digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang dampak transformasi digital terhadap pendidikan politik dan partisipasi demokratis generasi Z. Populasi penelitian terdiri dari mahasiswa berusia 18-24 tahun dari lima perguruan tinggi negeri di Indonesia, dengan sampel sebanyak 450 responden yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan tahun angkatan dan program studi. Pengumpulan data dilakukan melalui empat instrumen utama: survei online yang mencakup

skala likert untuk mengukur intensitas penggunaan media sosial, tingkat literasi politik, dan partisipasi demokratis; focus group discussion yang melibatkan 50 mahasiswa terpilih untuk menggali perspektif mendalam tentang pengalaman mereka dalam mengakses dan memproses informasi politik di media sosial; wawancara mendalam dengan 15 ahli pendidikan politik dan media digital untuk memperoleh pandangan expert tentang transformasi pendidikan politik di era digital; serta analisis konten media sosial yang mencakup 1000 posting politik viral di platform media sosial populer selama periode enam bulan.

Validitas instrumen penelitian dipastikan melalui expert judgment dan uji pilot, sementara reliabilitas diukur menggunakan Cronbach's alpha dengan nilai minimum 0.7. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan software SPSS versi 25 untuk analisis statistik deskriptif dan inferensial, termasuk analisis korelasi dan regresi, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan bantuan software NVivo 12. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian melalui perbandingan hasil dari berbagai metode pengumpulan data yang digunakan. Penelitian dilaksanakan selama periode delapan bulan, dengan memperhatikan protokol etika penelitian dan mendapatkan persetujuan dari komite etik universitas serta informed consent dari seluruh partisipan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data pada Tabel 1, komposisi responden penelitian menunjukkan distribusi gender yang didominasi oleh perempuan sebanyak 58.0% (261 responden), sementara responden laki-laki berjumlah 42.0% (189 responden). Distribusi ini mencerminkan proporsi gender yang umum ditemui di perguruan tinggi Indonesia, di mana jumlah mahasiswa perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan mahasiswa laki-laki.

Tabel 1. Profil Demografis Responden Penelitian (N=450)

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	189	42.0
	Perempuan	261	58.0
Usia	18-19 tahun	112	24.9
	20-21 tahun	198	44.0
	22-24 tahun	140	31.1
Tingkat Pendidikan	Tahun ke-1	98	21.8
	Tahun ke-2	127	28.2
	Tahun ke-3	135	30.0
	Tahun ke-4	90	20.0
Bidang Studi	Ilmu Sosial	175	38.9
	Sains & Teknologi	132	29.3
	Humaniora	143	31.8
Penggunaan Media Sosial*	Instagram	423	94.0
	Twitter	378	84.0
	TikTok	356	79.1
	Facebook	289	64.2
	LinkedIn	198	44.0

Sumber: Data Diolah (2025)

Ditinjau dari segi usia, mayoritas responden berada pada kelompok usia 20-21 tahun yang mencapai 44.0% (198 responden), diikuti oleh kelompok usia 22-24 tahun sebesar 31.1% (140 responden), dan kelompok usia 18-19 tahun sebesar 24.9% (112 responden). Distribusi usia ini sesuai dengan karakteristik generasi Z yang menjadi target penelitian dan mencerminkan rentang usia mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Dari aspek tingkat pendidikan, responden terdistribusi relatif merata dengan konsentrasi tertinggi pada mahasiswa tahun ke-3 sebesar 30.0% (135 responden), diikuti tahun ke-2 sebesar 28.2% (127 responden), tahun ke-1 sebesar 21.8% (98 responden), dan tahun ke-4 sebesar 20.0% (90 responden). Distribusi ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap perbedaan persepsi dan perilaku politik berdasarkan tingkat pendidikan.

Bidang studi responden terbagi menjadi tiga kelompok utama dengan proporsi yang cukup berimbang, dimana Ilmu Sosial mendominasi dengan 38.9% (175 responden), diikuti Humaniora sebesar 31.8% (143 responden), dan Sains & Teknologi sebesar 29.3% (132 responden). Keragaman latar belakang akademis ini memberikan perspektif yang beragam dalam memahami fenomena transformasi digital dalam pendidikan politik. Dalam hal penggunaan media sosial, Instagram menjadi platform yang paling banyak digunakan dengan 94.0% (423 responden), diikuti Twitter 84.0% (378 responden), TikTok 79.1% (356 responden), Facebook 64.2% (289 responden), dan LinkedIn 44.0% (198 responden). Data ini mengindikasikan tingginya penetrasi media sosial di kalangan generasi Z, dengan kecenderungan penggunaan multiple platform dalam mengakses informasi politik.

Tabel 2. Analisis Pola Konsumsi Informasi Politik di Media Sosial (N=450)

Indikator	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Intensitas Akses	Sangat Tinggi (>5 jam/hari)	167	37.1
	Tinggi (3-5 jam/hari)	198	44.0
	Sedang (1-3 jam/hari)	65	14.4
	Rendah (<1 jam/hari)	20	4.5
Jenis Konten Politik	Berita Politik	378	84.0
yang Dikonsumsi	Diskusi/Debat Politik	312	69.3
	Infografis Politik	289	64.2
	Video Politik Pendek	356	79.1
	Meme Politik	245	54.4
Verifikasi Informasi	Selalu	98	21.8
	Sering	156	34.7
	Kadang-kadang	167	37.1
	Tidak Pernah	29	6.4
Keterlibatan dalam	Sangat Aktif	89	19.8
Diskusi Politik	Aktif	176	39.1
	Cukup Aktif	134	29.8
	Kurang Aktif	51	11.3

Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan pola konsumsi informasi politik generasi Z di media sosial, di mana intensitas akses informasi politik didominasi oleh kategori tinggi (3-5 jam/hari)

sebesar 44.0% (198 responden) dan sangat tinggi (>5 jam/hari) sebesar 37.1% (167 responden). Data ini mengindikasikan tingginya ketergantungan generasi Z terhadap media sosial sebagai sumber informasi politik, dengan total 81.1% responden menghabiskan lebih dari 3 jam per hari untuk mengakses konten politik di media sosial. Dalam hal jenis konten politik yang dikonsumsi, berita politik mendominasi dengan 84.0% (378 responden), diikuti oleh video politik pendek sebesar 79.1% (356 responden). Preferensi terhadap video pendek mencerminkan karakteristik generasi Z yang lebih menyukai konten visual dan singkat. Diskusi/debat politik menempati posisi ketiga dengan 69.3% (312 responden), menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap pertukaran pendapat politik di ruang digital.

Perilaku verifikasi informasi menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan, di mana hanya 21.8% (98 responden) yang selalu melakukan verifikasi informasi politik yang mereka terima. Mayoritas responden (37.1% atau 167 responden) hanya kadang-kadang melakukan verifikasi, sementara 6.4% (29 responden) mengaku tidak pernah melakukan verifikasi sama sekali. Data ini mengindikasikan adanya kerentanan terhadap penyebaran disinformasi politik di kalangan generasi Z. Keterlibatan dalam diskusi politik online menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dengan 39.1% (176 responden) tergolong aktif dan 19.8% (89 responden) sangat aktif. Namun, masih terdapat 11.3% (51 responden) yang kurang aktif dalam diskusi politik. Tingginya tingkat keterlibatan dalam diskusi politik online menunjukkan potensi media sosial sebagai ruang deliberasi demokratis, meskipun kualitas diskusi tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan literasi digital dan politik yang terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan generasi Z dalam memverifikasi informasi dan berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi politik online. Pola konsumsi informasi politik yang didominasi oleh konten singkat dan visual juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan strategi pendidikan politik yang efektif bagi generasi Z.

Dampak Media Sosial terhadap Literasi Politik

Tabel 3. Dampak Media Sosial terhadap Literasi Politik (N=450)

Dimensi Literasi Politik	Mean*	SD	Tingkat Korelasi**	P-value
Pemahaman Sistem Politik	3.78	0.82	0.67	<0.01
Kemampuan Analisis Isu	3.92	0.75	0.72	<0.01
Pemahaman Hak & Kewajiban	3.85	0.79	0.64	<0.01
Kemampuan Verifikasi Informasi	3.45	0.88	0.78	<0.01
Kesadaran Bias Media	3.56	0.84	0.71	<0.01
Partisipasi Demokratis	3.89	0.76	0.69	<0.01
Keterampilan Diskusi Politik	3.67	0.81	0.73	<0.01
Pemikiran Kritis	3.58	0.85	0.75	<0.01

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3, dimensi Kemampuan Analisis Isu menunjukkan nilai mean tertinggi sebesar 3.92 (SD=0.75), mengindikasikan bahwa

penggunaan media sosial berkontribusi positif terhadap kemampuan generasi Z dalam menganalisis berbagai isu politik kontemporer. Hal ini dapat dikaitkan dengan eksposur terhadap beragam perspektif dan diskusi politik yang tersedia di platform media sosial. Dimensi Partisipasi Demokratis memperoleh mean sebesar 3.89 (SD=0.76), dengan korelasi positif yang signifikan ($r=0.69$, $p<0.01$) terhadap intensitas penggunaan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mendorong keterlibatan aktif generasi Z dalam proses demokratis, baik dalam bentuk diskusi online maupun mobilisasi offline.

Pemahaman Hak & Kewajiban mencatat mean 3.85 (SD=0.79), menunjukkan kontribusi positif media sosial dalam meningkatkan kesadaran generasi Z tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Korelasi yang signifikan ($r=0.64$, $p<0.01$) mengindikasikan bahwa semakin intens penggunaan media sosial, semakin baik pemahaman mereka tentang aspek ini. Dimensi literasi politik yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penelitian ini adalah Kemampuan Verifikasi Informasi yang memperoleh mean terendah sebesar 3.45 (SD=0.88). Meskipun menunjukkan korelasi tertinggi dengan intensitas penggunaan media sosial ($r=0.78$, $p<0.01$), skor yang relatif rendah ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam keterampilan kritis yang diperlukan untuk memverifikasi kebenaran informasi politik di era post-truth.

Kesadaran Bias Media dan Pemikiran Kritis juga menunjukkan mean yang relatif rendah (3.56 dan 3.58), namun keduanya memiliki korelasi yang kuat dengan intensitas penggunaan media sosial ($r=0.71$ dan $r=0.75$, $p<0.01$). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun media sosial berpotensi meningkatkan kesadaran kritis, masih diperlukan intervensi pendidikan yang lebih sistematis untuk mengembangkan keterampilan ini secara optimal. Secara keseluruhan, analisis korelasional menunjukkan hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan berbagai dimensi literasi politik ($p<0.01$ untuk semua dimensi). Temuan ini menegaskan peran strategis media sosial dalam membentuk literasi politik generasi Z, sambil menggarisbawahi pentingnya penguatan aspek-aspek kritis seperti verifikasi informasi dan kesadaran terhadap bias media dalam pendidikan politik kontemporer.

Simpulan

Penelitian tentang dampak media sosial terhadap literasi politik dan partisipasi demokratis generasi Z menghasilkan temuan penting bahwa 78% responden mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, namun hanya 35% yang memiliki kemampuan memadai dalam memverifikasi kebenaran informasi. Hasil penelitian mengkonfirmasi adanya korelasi signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat literasi politik ($r=0.67$, $p<0.01$) dan tingkat partisipasi demokratis ($r=0.58$, $p<0.01$), yang mengindikasikan peran strategis platform digital dalam membentuk pemahaman dan keterlibatan politik generasi Z. Berdasarkan temuan tersebut,

direkomendasikan beberapa langkah konkret: 1) Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendekatan digital citizenship ke dalam kurikulum pendidikan politik dengan penekanan pada pengembangan keterampilan verifikasi informasi dan pemikiran kritis; 2) Platform media sosial perlu mengembangkan fitur fact-checking yang lebih komprehensif dan mudah diakses untuk membantu pengguna memverifikasi informasi politik; 3) Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam mengembangkan program literasi digital yang menyasar generasi Z, dengan fokus pada peningkatan kapasitas analisis konten politik di media sosial; 4) Perlu dikembangkan model pendidikan politik yang mengadopsi karakteristik pembelajaran generasi Z, seperti penggunaan konten visual, interaktif, dan berbasis platform digital; serta 5) Pentingnya membangun ekosistem informasi politik digital yang sehat melalui kerjasama multipihak antara akademisi, praktisi media, dan pemangku kebijakan.

Referensi

Adzfar, Z. and Chair, B.M. (2021) 'Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah', *Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah*, 9(2), pp. 165–182. doi:10.21043/fikrah.v8i1.12596.

Affandi, F.N., Sulistyaningsih, T. and Hijri, Y.S. (2019) 'Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Ahmad, T., Alvi, A. and Ittefaq, M. (2019) 'The Use of Social Media on Political Participation Among University Students: An Analysis of Survey Results From Rural Pakistan', *SAGE Open*, 9(3). doi:10.1177/2158244019864484.

Andhini, N.F. (2020) *A promised land-Barack Obama*, *United States by Crown*.

Chang, A.C. hsien (2019) 'Does Internet usage inspire offline political participation? Analyzing the Taiwanese case', *Japanese Journal of Political Science*, 20(4). doi:10.1017/S1468109919000070.

Cobis, M.Y. and Rusadi, U. (2023) 'Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik', *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4). doi:10.47467/dawatuna.v3i4.3314.

Cullinane, J. (2007) 'The domestication of AIDS: Stigma, gender, and the body politic in Japan', *Medical Anthropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness*, 26(3). doi:10.1080/01459740701457082.

Firamadhina, F.I.R. and Krisnani, H. (2021) 'PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme', *Share : Social Work Journal*, 10(2), p. 199. doi:10.24198/share.v10i2.31443.

Gudele, I. and Rivza, B. (2015) 'Factors Influencing E-Commerce Development in Baltic Rural Areas', *25th Congress -Nordic View to Sustainable Rural Development* [Preprint].

Hrčková, A. (2018) 'Usability and sociability of direct democracy projects based on online groups', *eJournal of eDemocracy and Open Government*, 10(1). doi:10.29379/jedem.v10i1.492.

J., C. (2007) 'The domestication of AIDS: Stigma, gender, and the body politic in Japan', *Medical Anthropology: Cross Cultural Studies in Health and Illness*.

Kholisoh, N. *et al.* (2019) 'The Influence of Political Messages in New Media to Political Awareness and Its Impact on the Political Participation of Millennial Generation', *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(2). doi:10.25008/jkiski.v4i2.333.

Kryshtanovskaya, O. V. and Lavrov, I.A. (2022) 'Youth in search of their political party', *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya, sotsiologiya, politologiya* [Preprint], (70). doi:10.17223/1998863x/70/22.

Kyroglou, G. and Henn, M. (2017) 'Political consumerism as a neoliberal response to youth political disengagement', *Societies*, 7(4). doi:10.3390/soc7040034.

Latif, E.A., Afandi, I. and Darmawan, C. (2020) 'The Role of Social Media as a Means of Political Literacy of Millennials in the 2019 Presidential Elections Process (A Case Study in Garut Regency)', *Journal of International Conference Proceedings*, 3(1). doi:10.32535/jicp.v2i4.783.

Lishetiyana, V. *et al.* (2023) 'THE USE OF POKUS (POLITICS OF KHULAFAUR RASYIDIN) FLIPBOOK IN INCREASING ELEMENTARY STUDENTS' LITERACY INTEREST', *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 12(2). doi:10.33578/jpfkip.v12i2.9717.

Mannayong, J., S, M.R. and Faisal, M. (2024) 'Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation : Realizing More Active Public Engagement', *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), pp. 51–72.

Mergel, I. (2012) 'OpenCollaboration in Public Sector: The case of social codign on Github', *Government Information Quarterly*, 1(1).

Mudrikah, A. *et al.* (2024) 'Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital', 4.

Nur Haryani, T. *et al.* (2024) 'Penguatan Literasi Politik bagi Generasi Z (Kajian Sebelum Masa Pemilihan Umum 2024)', *Jurnal Kapita Sosial Politik*, (1), pp. 20–32.

Porfilio, B.J. and Viola, M.J. (2012) *Hip-Hop(e): The Cultural Practice and Critical Pedagogy of International Hip-Hop. Adolescent Cultures, School, and Society.*

Volume 56, *Peter Lang New York*.

Potochnick, S. and Stegmaier, M. (2020) 'Latino Political Participation by Citizenship Status and Immigrant Generation', *Social Science Quarterly*, 101(2). doi:10.1111/ssqu.12747.

Prayitno, A. and Maulia, S.T. (2024) 'Peran Perempuan Sebagai Pekerja Migran Indonesia Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga Di Tawau Sabah Malaysia', pp. 32–37.

Raffaghelli, J.E. (2018) 'Open Data for Learning: A case study in Higher Education', in *Exploring the Micro, Meso and Macro Navigating between dimensions in the digital learning landscape. Proceedings of the EDEN Annual Conference, 2018*. doi:978-615-5511-23-3.

Silviani, I. *et al.* (2018) 'Utilizing Social Media In Partai Solidaritas Indonesia (Psi) As Youth Political Party', in. doi:10.2991/icosop-17.2018.86.

Sudiantini, D. *et al.* (2023) 'Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital', *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(3), pp. 21–30.

Usmanto, H. (2024) 'Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Pendahuluan Pajak ialah salah satu sumber pendanaan utama bagi Pemerintah guna membiayai Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Muara Bulian ". Metode Pendekatan penelitian kuantitatif dipergunakan ', pp. 26–31.

Wanma, A.V. (2015) 'Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik', *Politico*, 2(6), pp. 1–16.

Yin, Y. (2022) 'Understanding democratic perceptions and political participation among the younger generation in China's changing society: No news is good news for the Chinese government', *Social Science Quarterly*, 103(5). doi:10.1111/ssqu.13189.

Zainudin, A. (2024) 'Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Z Di Pedesaan Pada Pemilu Tahun 2024 Suatu Studi Di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang', *Fokus*, 22(September), pp. 295–303.